

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta diutamakan bagi tanah yang dimiliki oleh perseorangan dengan bentuk ganti kerugian berupa uang, berdasarkan kelengkapan berkas administrasi, hasil validasi, dan verifikasi data.
2. Penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap selain pemilik tanah dapat dilakukan dengan putusan pengadilan terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dan/atau asas pemisahan horizontal bagi penyewa tanah atau pemilik benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

B. Saran

1. Instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian sebaiknya dilibatkan sejak tahap perencanaan, agar data yang diperoleh merupakan data yang valid, sehingga akan mempercepat proses pengadaan tanah dan meminimalisir permasalahan terkait data pihak yang berhak.
2. Bagi pihak yang berhak sebaiknya memberikan informasi yang sebenarnya terkait status tanah yang dikuasainya, agar pemberian ganti kerugian tidak salah sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2022, *Kabupaten Klaten dalam Angka 2022*, BPS Kabupaten Klaten.
- Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, 2019, *Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, 2018, 'Evaluasi progres pengadaan tanah PSN dan non PSN', *Materi kuliah umum di STPN pada 6 November 2018*, Yogyakarta.
- Gunanegara, 2004, *Pengadaan Tanah oleh Negara untuk Kepentingan Umum*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- _____, 2008, *Rakyat dan Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, PT Tatanusa, Jakarta.
- Hadjon, P.M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Halim, AR 1987, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, B 2012, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid X Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.
- Limbong, B 2012, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, S 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Oktaviani, YW 2020, 'Tumpang tindih kepemilikan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum', dalam Prihastuty, E Supinah dan Purwasari, DA (ed), *Keadilan Agraria dan Penataan Ruang*, STPN Press, Yogyakarta.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2018, 'Modul 4: Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan', *Diklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung.

_____, 2019, *Modul Penyusunan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) SPALD Perkotaan*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2018, *Modul Pengadaan Lahan (Land Acquisition)*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung.

Putro, WD 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, S 2021, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ratnawati, E. T. R. 2010, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, MaCell Press, Yogyakarta.

Rato, D 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Salim, MN & Dewi, NLGMP 2020, *Berakhir di Temon: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk Yogyakarta International Airport (YIA)*, STPN Press, Yogyakarta.

Salindeho, J, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja, Yogyakarta.

Sembiring, J & Riyadi, R 2018, 'Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Utara terhadap Eksistensi Tanah Ulayat di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat', dalam Utami, W dan Dewi, AR (ed), *Hasil penelitian sistematis: multipurpose cadaster pengadaan tanah dan legalisasi aset*, STPN Press, Yogyakarta.

Setiowati, Martanto, R & Kistiyah, S 2019, 'Urgensitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan penyelesaian permasalahan pengadaan tanah', dalam Luthfi, AN dan Utami, W (ed), *Himpunan policy brief: masalah dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sumardjono, MSW 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

_____, 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 2018, *Regulasi pertanahan dan semangat keadilan agraria*, STPN Press, Yogyakarta.

Sumarja, FX 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Sutedi, A 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrani, R 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tauchid, M 2009, *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

Wibowo, A 2005, *Evaluasi Pensertipikatan Tanah Negara Bekas Oro Oro Secara Massal Swadaya di Desa Pelemrejo Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, STPN Press, Yogyakarta.

Jurnal

Dewi, AR Sutaryono, Nurhikmahwati, A 2020, 'Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6 no. 2 hlm. 277-291.

Dewi, NLGMP 2017, 'Yang selesai dan yang tertunda: problematika ganti kerugian pengadaan tanah *New Yogyakarta International Airport (NYIA)*', *Prosiding seminar nasional: Problematika pertanahan dan strategi penyelesaiannya*, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yogyakarta.

Dotulong, I 2016, 'Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 3, hlm. 97-104.

- Lubis, AS 2019, 'Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta terhadap Bidang Tanah yang Tidak Memiliki Alas Hak', *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1), hlm. 1-12.
- Harsono, B 1990, 'Aspek Yuridis Penyediaan Tanah', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20 No. 2, hlm. 155-190.
- Hidayat, RA 2016, 'Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah pada Kawasan Hutan', *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume IV Nomor 2, hlm. 84-95.
- Julyano, M & Sulistyawan, AY 2019, 'Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Volume 01 Nomor 01, hlm. 13-22.
- Prasetyo, PK Christine RV, Sudibyanung, 2020, 'Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 6 no. 1 hlm. 15-27.
- Purwaningsih, E & Rahmanto, D 2019, 'Pengadaan tanah demi kepentingan umum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Trans Sumatera', *Jurnal Lex Librum*, Vol. VI No. 2 hlm. 65-84.
- Purwaka, TH 2015, 'Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4 Nomor 3, hlm. 519-536.
- Sarjita & Noerdin, R 2014, 'Aspek Hukum Pidana pada Penyelenggaraan Pengadaan Tanah', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 40 tahun XIII, hlm. 576-600.
- Subekti, R 2016, 'Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum', *Jurnal Yustisia*, Vol. V No.2, hlm. 376-394.
- Sudirman, S 2014, 'Pembangunan Jalan Tol di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, no. 40 tahun XIII, hlm. 522-544.
- Suntoro, A 2019, 'Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM', *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 5, no. 1, hlm. 13-25.

Surono, A 2017, 'Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Kendal', *Prosiding seminar nasional: Problematika pertanahan dan strategi penyelesaiannya*, STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria-Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yogyakarta.

Tesis

Buana, MS 2010, 'Hubungan Tarik-Menarik antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainpi*) dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi', *Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Fitriani, R 2018, 'Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum UUPA (Studi Kasus Pembuatan Tol Sumatera di Wilayah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan)', *Tesis pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Marlijanto, SD 2010, 'Konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum (studi pengadaan tanah untuk pembangunan proyek Jalan Tol Semarang – Solo di Kabupaten Semarang)', *Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Papalia, I 2017, 'Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Islam', *Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Siregar, M 2018, 'Pengadaan Tanah dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam Upaya Mewujudkan Proyek 35.000 MW', *Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1138)

Sumber lainnya

Anonim, *Arti Kata Tinjau*, <https://kbbi.web.id/tinjau> diakses pada 18 Februari 2022

_____, *Pengertian Tinjauan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan> diakses pada 18 Februari 2022

_____, *Pengertian Yuridis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis> diakses pada 18 Februari 2022

Ramadhan, A 2016, *Bab II Landasan Teori 2.1. Uraian Teori*, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1434/5/128400237_file5.pdf diakses pada 18 Februari 2022